

DOKUMEN JAWABAN
PERTANYAAN EVALUASI
PUG 2023



Kategori: Kementerian

Nama: Kementerian Luar Negeri

Nilai Evaluasi PUG: 956.55

PELEMBAGAAN PUG

Nilai Maksimal: 155.00

1. PELEMBAGAAN PUG

1. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum Penyelenggaraan PUG secara komprehensif?

Nilai Maksimal: 30.00

Nilai: 30.00

Jawaban:

Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)

☒ 1) Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

☐ 2) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kemlu telah memiliki regulasi sebagai landasan hukum komprehensif dan bentuk komitmen penyelenggaraan PUG dengan ditetapkan dan diundangkannya:

1. Peraturan Menlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemlu;
2. Keputusan Menlu No. 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kemlu dan Perwakilan RI; dan
3. Surat Edaran Menlu No. SE/00031/KP/11/2021/03 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Kemlu dan Perwakilan RI.

1. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG

Apakah regulasi/kebijakan Penyelenggaraan PUG oleh K/L sudah mengintegrasikan gender secara komprehensif ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan?

Nilai Maksimal: 30.00

Nilai: 30.00

Jawaban:

Ya (Sebutkan dan Lampirkan)

☒ 1) Perencanaan

☒ 2) Penganggaran

☒ 3) Pelaksanaan

☒ 4) Pemantauan

☒ 5) Evaluasi

☒ 6) Pengawasan

☒ 7) Pelaporan

☐ Tidak

Catatan:

Regulasi penyelenggaraan PUG di Kemlu telah mengintegrasikan gender secara komprehensif ke semua 7 proses pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Ketujuh proses pembangunan tersebut menjadi lingkup dan dimuat dalam pasal-pasal dari:

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
2. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/XI1/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Adapun detail pasal yang mengatur 7 proses pembangunan tersebut, antara lain sbb:

1. Perencanaan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada Pasal 4-7 dan Lampiran serta Kepmenlu No. 03/B/LA/XI1/2021/01 Tahun 2021
2. Penganggaran disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada Pasal 7, 11, dan 16 dan Lampiran serta Kepmenlu No. 03/B/LA/XI1/2021/01 Tahun 2021
3. Pelaksanaan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 8-11 dan Lampiran serta Kepmenlu No. 03/B/LA/XI1/2021/01 Tahun 2021
4. Pemantauan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 15 dan Lampiran serta Kepmenlu No. 03/B/LA/XI1/2021/01 Tahun 2021
5. Evaluasi disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 8, 11-15 dan Lampiran serta Kepmenlu No. 03/B/LA/XI1/2021/01 Tahun 2021
6. Pengawasan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 8, 11 dan Lampiran serta Kepmenlu No. 03/B/LA/XI1/2021/01 Tahun 2021
7. Pelaporan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 12-15 dan Lampiran serta Kepmenlu No. 03/B/LA/XI1/2021/01 Tahun 2021

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG

- 1) Jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG
- 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG di masing-masing UKE I
- 3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi dan tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), termasuk SDM Perencana telah terlatih subtransi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Berikut rincian Data SDM Perencana terlatih PUG Kemlu Tahun 2021:

- 1) Jumlah SDM Perencana dan Penganggaran = 75 orang (30 laki-laki dan 45 perempuan)
- 2) Rincian jumlah SDM Perencana dan Penganggaran di masing-masing UKE I (data terlampir)
- 3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Perencana dan Penganggaran = 100%

Di tahun 2021, Kemlu secara aktif melaksanakan Bimtek PUG dan PPRG, serta penyusunan laporan PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI. Kegiatan dilaksanakan secara bergiliran oleh masing-masing Satker Pusat dengan target peserta adalah seluruh elemen SDM Kementerian Luar Negeri, terutama Pejabat Satker Eselon I dan II, Kepala Perwakilan, anggota Pokja PUG yang selanjutnya menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman dan mendorong seluruh SDM di Satker masing-masing untuk memperkuat pengintegrasian PUG dalam program Satkernya.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM Teknis

- 1) Jumlah SDM Teknis terlatih PUG
- 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Teknis terlatih PUG di masing-masing UKE I
- 3) Persentase PD yang memiliki SDM Teknis terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), termasuk SDM Teknis/Pelaksana telah terlatih substansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Berikut rincian Data SDM Teknis terlatih PUG Kemlu Tahun 2021:

- 1) Jumlah SDM Teknis terlatih PUG = 196 orang
- 2) Rincian jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG di masing-masing UKE I (data terlampir)
- 3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG = 100%

Di tahun 2021, Kemlu secara aktif melaksanakan Bimtek PUG dan PPRG, serta penyusunan laporan PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI. Kegiatan dilaksanakan secara bergiliran oleh masing-masing Satker Pusat dengan target peserta adalah seluruh elemen SDM Kementerian Luar Negeri, terutama Pejabat Satker Eselon I dan II, Kepala Perwakilan, anggota Pokja PUG yang selanjutnya menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman dan mendorong seluruh SDM di Satker masing-masing untuk memperkuat pengintegrasian PUG dalam program Satkernya.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG

- 1) Jumlah SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG
- 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG di masing-masing UKE I
- 3) Persentase UKE I memiliki SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), termasuk SDM Pemantau telah terlatih substansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Berikut rincian Data SDM Pemantau terlatih PUG Kemlu Tahun 2021:

- 1) Jumlah SDM Pemantau = 62 orang (27 laki-laki dan 35 perempuan)
- 2) Rincian jumlah SDM Pemantau di masing-masing UKE I (data terlampir)
- 3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Pemantau = 80% (8 dari 10 UKE I).

Di tahun 2021, Kemlu secara aktif melaksanakan Bimtek PUG dan PPRG, serta penyusunan laporan PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI. Kegiatan dilaksanakan secara bergiliran oleh masing-masing Satker Pusat dengan target peserta adalah seluruh elemen SDM Kementerian Luar Negeri, terutama Pejabat Satker Eselon I dan II, Kepala Perwakilan, anggota Pokja PUG yang selanjutnya menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman dan mendorong seluruh SDM di Satker masing-masing untuk memperkuat pengintegrasian PUG dalam program Satkernya.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM APIP terlatih PUG

- 1) Persentase SDM APIP terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh SDM APIP Kementerian Luar Negeri telah terlatih substansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Di tahun 2021, tercatat terdapat sebanyak 116 SDM APIP yang terdiri dari 49 laki-laki dan 67 perempuan.

Di tahun 2021, Kemlu secara aktif melaksanakan Bimtek PUG dan PPRG, serta penyusunan laporan PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI. Kegiatan dilaksanakan secara bergiliran oleh masing-masing Satker Pusat dengan target peserta adalah seluruh elemen SDM Kementerian Luar Negeri, terutama Pejabat Satker Eselon I dan II, Kepala Perwakilan, anggota Pokja PUG yang selanjutnya menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman dan mendorong seluruh SDM di Satker masing-masing untuk memperkuat pengintegrasian PUG dalam program Satkernya.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM bidang Hukum terlatih PUG

1) Persentase SDM bidang Hukum terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), termasuk SDM bidang Hukum telah terlatih substansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Di tahun 2021, terdapat 41 orang SDM bidang Hukum yang tersebar di berbagai Satker di Kementerian Luar Negeri.

Di tahun 2021, Kemlu secara aktif melaksanakan Bimtek PUG dan PPRG, serta penyusunan laporan PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI. Kegiatan dilaksanakan secara bergiliran oleh masing-masing Satker Pusat dengan target peserta adalah seluruh elemen SDM Kementerian Luar Negeri, terutama Pejabat Satker Eselon I dan II, Kepala Perwakilan, anggota Pokja PUG yang selanjutnya menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman dan mendorong seluruh SDM di Satker masing-masing untuk memperkuat pengintegrasian PUG dalam program Satkernya.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki Gender Champions?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan SK

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri memiliki Gender Champions yang terdiri dari seluruh unsur Kelompok Kerja (Pokja) PUG pada tingkat K/L yang diketuai oleh Staf Ahli Menlu Bidang Manajemen, serta Pokja pada tingkat UKE I, Perwakilan RI di Luar Negeri, dan Tim Pelaporan PUG yang menjadi motor penggerak PUG di Lembaga dan Satuan Kerja masing-masing. Para anggota Pokja merupakan staf terpilih berdasarkan kompetensi dan komitmen dalam memajukan PUG di lingkup Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Secara khusus, Menteri Luar Negeri menjadi gender champion utama Kementerian Luar Negeri. Peran Menlu sebagai gender champion juga diakui antara lain dalam forum internasional, melalui peran aktif dalam G20 Ministerial Conference on Women Empowerment dan Action for Peacekeeping (A4P) Women Peace and Security Champions Tahun 2021.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki Focal Point PUG?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan SK

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri memiliki Focal Points yang terdiri dari seluruh unsur Kelompok Kerja (Pokja) PUG pada tingkat Lembaga, UKE I, Perwakilan RI di Luar Negeri, dan Tim Pelaporan PUG yang menjadi motor penggerak PUG di Lembaga dan Satuan Kerja masing-masing. Para anggota Pokja merupakan staf terpilih berdasarkan kompetensi dan komitmen dalam memajukan PUG di lingkup Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah KL memiliki Fasilitator PUG?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Bersertifikat dan lampirkan SK

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kemlu telah memiliki Fasilitator PUG yang bersertifikat.

Kementerian Luar Negeri memiliki Fasilitator PUG yang terlatih baik dari eksternal (KPPPA) maupun internal melalui Bimtek PPRG di seluruh Satker dan Perwakilan.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG?

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya, dengan landasan hukum berupa (Lampirkan)

☒ 1) Surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga

☐ 2) Bentuk lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki Pokja PUG pada seluruh Satker Pusat dan sebagian besar Perwakilan RI yang dituangkan dalam Surat Keputusan terlampir contoh SK Pokja PUG Untuk Satker Pusat dan Perwakilan.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Jika KL memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh UKE I terkait?

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

☒ Ya

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri memiliki Pokja PUG pada yang beranggotakan unsur seluruh UKE I yang dituangkan dalam Surat Keputusan Eselon I.

Terlampir beberapa SK Pokja PUG Kementerian Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Jika KL memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh UKE II terkait?

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

☒ Ya

☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki Pokja PUG yang beranggotakan seluruh unit Eselon II yang tertuang pada SK Pokja PUG Eselon I.

terlampir contoh SK Pokja PUG Untuk Satker Pusat dan Perwakilan.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG 5 (lima) Tahunan?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan)

☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I

☐ 2) Bentuk lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Pokja PUG setiap tahunnya membuat Renaksi Pokja (jangka pendek) di awal tahun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan. Selain itu Pokja juga telah menginventarisir garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka panjang. Renaksi ini dituangkan dalam laporan hasil Forum Komunikasi yang rutin dilaksanakan paling tidak sebanyak 2x setiap tahunnya.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG Tahunan?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan)

☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I

☐ 2) Bentuk lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Pokja PUG setiap tahunnya membuat Renaksi Pokja (jangka pendek) di awal tahun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan. selain itu Pokja juga telah menginventarisir garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahun, termasuk di Perwakilan RI di Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Rencana Aksi Pokja K/L 5 (lima) tahunan tentang Penyelenggaraan PUG memuat 3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG? (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 1.50

Jawaban:

Ya

☒ 1) Kebijakan

☒ 2) SDM dan Internalisasi PUG

☒ 3) Data Terpilah

☐ Tidak

Catatan:

Renaksi Pokja 5 Tahunan yang tertuang dalam Permenlu 21/2020 di lingkungan Kemlu telah memuat 3 prasyarat pelembagaan PUG yang juga diturunkan ke dalam Renaksi dan SK Pokja PUG tahunan.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Rencana Aksi Pokja K/L 5 (lima) tahunan tentang Penyelenggaraan PUG, memuat 7 (tujuh) proses Penyelenggaraan PUG? (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

Ya

☒ 1) Perencanaan

☒ 2) Penganggaran

☒ 3) Pelaksanaan

☒ 4) Pemantauan

☒ 5) Evaluasi

☒ 6) Pengawasan

☒ 7) Pelaporan

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Rencana Aksi Pokja Jangka Panjang Kementerian Luar Negeri yang tertuang dalam Permenlu 21/2020 khususnya Bab III-Bab V telah menginventarisir garis besar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang yang didalamnya telah memuat 7 proses penyelenggaraan PUG, keseluruhan proses ini diturunkan dalam renaksi dan SK Tahunan Pokja PUG Kementerian Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Rencana Aksi Pokja K/L tahunan tentang Penyelenggaraan PUG, memuat 3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG? (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 1.50

Jawaban:

Ya

☒ 1) Kebijakan

☒ 2) SDM dan Internalisasi PUG

☒ 3) Data Terpilah

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Rencana Aksi Pokja Kementerian Luar Negeri telah memuat 3 prasyarat pelembagaan PUG yang dituangkan dalam SK Tahunan Pokja PUG Kementerian Luar Negeri.

Pokja PUG membuat Renaksi Pokja di awal tahun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan, selain itu Pokja juga telah menginventarisir garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka panjang yang dituangkan dalam Permenlu 21/2020 BAB III-BAB V.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Rencana Aksi Pokja K/L tahunan tentang Penyelenggaraan PUG, memuat Tujuh (7) proses penyelenggaraan PUG? (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

Ya

☒ 1) Perencanaan

☒ 2) Penganggaran

☒ 3) Pelaksanaan

☒ 4) Pemantauan

☒ 5) Evaluasi

☒ 6) Pengawasan

☒ 7) Pelaporan

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Rencana Aksi Pokja Kementerian Luar Negeri tahunan telah memuat 7 proses penyelenggaraan PUG yang dituangkan dalam SK Tahunan Pokja PUG Kementerian Luar Negeri.

Pokja PUG membuat Renaksi Pokja di awal tahun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan, selain itu Pokja juga telah menginventarisir garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka panjang yang dituangkan dalam Permenlu 21/2020 Pasal 8-15.

Renaksi ini turut dituangkan dalam laporan hasil Forum Komunikasi yang rutin dilaksanakan paling tidak sebanyak 2 x setiap tahunnya.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Perempuan yang menduduki jabatan Eselon

Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon I

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 0.70

Jawaban:

☒ Data tersedia

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai=14%

Di tahun 2021, terdapat 2 pejabat Perempuan yang menduduki jabatan setara Eselon I di Kementerian Luar Negeri

Berita: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2820/berita/menlu-ri-lantik-para-pejabat-untuk-jabatan-pimpinan-tinggi-madya-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-dan-3-konsul-jenderal-ri>

2. SDM dan Internalisasi PUG

Perempuan yang menduduki jabatan Eselon

Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon II
Tulis nilai persentase pada catatan!
(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 1.35

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 45%

Di tahun 2021, terdapat 25 pejabat Perempuan yang menduduki jabatan setara Eselon II dari 55 pegawai yang menjabat di Kementerian Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Perempuan yang menduduki jabatan Eselon
Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon III
Tulis nilai persentase pada catatan!
(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 1.40

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai=70%

Di tahun 2021, terdapat 42 pegawai perempuan menduduki jabatan struktural Eselon III dari 60 jabatan Eselon III yang terisi di Kementerian Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L melakukan internalisasi PUG di lingkup Internal?

Nilai Maksimal: 9.00

Nilai: 9.00

Jawaban:

- Ya, dalam bentuk apa? dan lampirkan!
- ☒ 1) Sosialisasi (Lampirkan laporan kegiatan)
☒ 2) Pelatihan (Lampirkan laporan kegiatan)
☒ 3). Lainnya (Lampirkan laporan kegiatan)
☐ Tidak

Catatan:

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Luar Negeri telah mengintegrasikan kebijakan pengarusutamaan gender ke dalam berbagai kegiatan dan program di Pusat dan Perwakilan dalam rangka memperkuat internalisasi PUG di lingkup internal Kementerian Luar Negeri.

Beberapa program yang menjadi highlight pelaksanaan internalisasi PUG di Kementerian Luar Negeri di antaranya:

1. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis PUG bagi pegawai pusat, anggota kelompok kerja maupun bagi pegawai di seluruh Perwakilan RI;
2. Talk Show dan Webinar yang bertajuk pemberdayaan perempuan, peran perempuan dalam diplomasi, dan membangun lingkungan kerja profesional tanpa pelecehan seksual;
3. Komitmen seluruh unsur pimpinan Kemlu atas penciptaan lingkungan kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual, dalam bentuk Pakta Integritas.
4. Pelaksanaan berbagai sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pegawai pusat, anggota kelompok kerja maupun bagi pegawai di seluruh Perwakilan Republik Indonesia;
5. Peringatan hari Kartini dalam bentuk Talk Show: Kartini dan Kesetaraan Gender, Perspektif Diplomat Pria pada 21 April 2021;
6. Pelaksanaan Townhall Meeting "Membangun Lingkungan Kerja Profesional Tanpa Pelecehan Seksual" di Kementerian Luar Negeri pada 29 April 2021;
7. Dihasilkannya beberapa kajian termasuk Penyusunan Kajian Isu Pasangan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
8. Berbagai Webinar termasuk webinar "Peran Diplomat Perempuan dalam Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri" di Kementerian Luar Negeri;
9. Kegiatan KBRI Kuala Lumpur: Penyediaan akses terhadap fasilitas dan sarana Kesehatan berbasis gender bagi WNI di shelter KBRI Kuala Lumpur;
10. Kegiatan KBRI Singapura: Startups, Women and Entrepreneurship in the Uncertain Global Market dan Self-love untuk Ketahanan Mental Perempuan;
11. Kegiatan KBRI Copenhagen: Diskusi Panel International Women's Day 2021: Women in Leadership;
12. Peran diplomasi KBRI/PTRI Wina di fora multilateral, khususnya pada Sesi ke-19 General Conference of the United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO), di Wina, Austria, 29 November - 3 Desember 2021 dalam mendorong diadopsinya Resolusi UNIDO, Gender Equality and Empowerment of Women.

3. Data Terpilah

Apakah K/L memiliki sistem data terpilah?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya. Sebutkan nama sistem aplikasi pencatatan/data terpilah menurut jenis kelamin!

☒ 3 sistem aplikasi atau lebih

☐ 2 sistem aplikasi

☐ 1 sistem aplikasi

☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki aplikasi:

1. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM SDM) yang memiliki pencatatan/data terpilah menurut jenis kelamin.
2. Sistem Data digital Peduli WNI yang bisa diakses langsung secara online, dengan link: peduliwni.kemlu.go.id.
3. Lainnya; yaitu data kepegawaian yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Perwakilan RI, SIM Non-ASN Kementerian Luar Negeri, data survey Indeks Citra, data pengusaha dan investor yang dikelola Fungsi Ekonomi pada Perwakilan RI, data mahasiswa Indonesia yang dikelola oleh Fungsi Protkons dan Pensosbud pada Perwakilan RI.

3. Data Terpilah

Sebutkan publikasi rutin data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkan K/L (dapat dalam bentuk profil gender sektoral)!

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya (sebutkan dan Lampirkan)

☒ 3 data atau lebih

☐ 2 data

☐ 1 data

☐ Tidak

Catatan:

- 1) Publikasi statistik pegawai Kemlu pada platform media sosial Kementerian Luar Negeri
- 2) Publikasi sebaran WNI di berbagai kawasan dan negara
- 3) Data pilah pegawai seluruh Kemlu dan Satker Eselon II

3. Data Terpilah

Persentase UKE I (teknis) yang memiliki Data Terpilah sektoral (di luar statistik dasar yang dipublikasikan BPS). Lampirkan.

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Data tersedia

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh UKE I Kementerian Luar Negeri memiliki data terpilah sektoral terkait kepegawaian. Berikut beberapa contoh data pilah SDM Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler tahun 2021, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN).

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Nilai Maksimal: 745.00

2. Perencanaan

1. Regulasi/Kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Perencanaan

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya, dalam bentuk apa? dan lampirkan!

☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I

☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis

☐ 3) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kemlu telah memiliki regulasi teknis yang mengatur PUG dalam perencanaan. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang mekanisme perencanaan PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemlu; dan
2. Keputusan Menlu No. 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kemlu dan Perwakilan RI.

Di level teknis atau UKE I, terdapat Keputusan UKE I yang menetapkan pembentukan Pokja PUG dan tugas Pokja yang di antaranya adalah mengimplementasikan dan mengoordinasikan perencanaan PUG di masing-masing UKE I.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Apakah K/L telah melakukan analisis gender dalam menyusun Dokumen Perencanaan lima tahunan dan tahunan?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan bukti dokumennya)

☒ 1) Dokumen perencanaan lima tahunan

☒ 2) Dokumen perencanaan tahunan

☐ Tidak

Catatan:

1. Perencanaan Responsif Gender Lima Tahunan telah tercantum dalam Renstra Kemenlu tahun 2020 - 2024, khususnya dalam bahasan terkait Arah kebijakan peningkatan infrastruktur diplomasi berbasis teknologi informasi (Halaman 83 - 106)
2. Perencanaan Responsif Gender Tahunan telah tercantum dalam Rencana Aksi Tahunan Pokja Kemenlu tahun 2021.

2. Sebutkan isu gender yang teridentifikasi dari hasil analisis gender (Lampirkan bukti analisisnya)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

Ya

☒ 1) Bidang Politik

☒ 2) Bidang Hukum

☒ 3) Bidang Sosial

☒ 4) Bidang Ekonomi

☒ 5) Bidang Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

- 1) Bidang Politik Keamanan: Isu women, peace and security, akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga akan terus mendorong dan mempromosikan peran perempuan dalam perdamaian melalui implementasi ASEAN Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security, UN Resolution 1325: Women, Peace and Security, dan komitmen ASEAN-IPR terhadap pengarusutamaan gender (Halaman 63)
- 2) Bidang Hukum: Penyelenggaraan pelayanan publik berupa pencatatan dan penerbitan dokumen sipil bagi WNI di luar negeri, khususnya pencatatan dan penerbitan akta pernikahan dan kelahiran adalah upaya vital dalam rangka perlindungan hak sipil perempuan dan anak. Banyak negara sahabat yang tidak mengizinkan atau melayani pencatatan pernikahan dan kelahiran bagi PMI di luar negeri, yang mengakibatkan kerentanan bagi perempuan sebagai istri dan anak-anak hasil pernikahan tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah membangun aplikasi Portal Peduli WNI yang memfasilitasi layanan penerbitan akta kelahiran dan Nomor Induk Terpadu (NIT) pengganti Nomor Induk Kependudukan bagi anak-anak PMI di luar negeri. Hingga 18 Juni 2020, Portal Peduli WNI telah menerbitkan sebanyak 25 akta kelahiran dan 1 NIT. Kedepannya, melalui kerja sama dengan Kementerian Agama, Portal Peduli WNI juga akan memfasilitasi layanan pencatatan pernikahan bagi WNI muslim di luar negeri. (Halaman 65)
- 3) Bidang sosial: Dalam rangka memastikan perlindungan WNI di luar negeri yang inklusif, Kementerian Luar Negeri terus melaksanakan diplomasi, kerja sama, dan fasilitasi a) penyelenggaraan pendidikan dasar bagi anak-anak PMI di luar negeri, b) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan keterampilan PMI di Perwakilan RI di luar negeri, c) penyusunan pedoman manajemen shelter (tempat singgah sementara/TSS) dan pelayanan publik yang sensitif gender dan pengawasan implementasinya, serta peningkatan kapasitas pejabat fungsional diplomat terkait isu-isu gender.
- 4) Bidang Ekonomi: Peningkatan keterlibatan pelaku usaha perempuan dilakukan melalui berbagai forum bisnis maupun organisasi/forum internasional, diantaranya:
 - a. Kementerian Luar Negeri secara reguler menyelenggarakan "Indonesia-Latin America and the Caribbean (INALAC) Business Forum" setiap tahunnya. Berbagai hal lain yang dicapai melalui kegiatan ini adalah pengarusutamaan gender dan penguatan ekonomi pengusaha, termasuk pengusaha perempuan dengan memperluas jaringan antara organisasi perempuan yang terkait dengan perdagangan internasional.
 - b. Di IORA, Indonesia merupakan salah satu negara pendorong (leading countries) pada area kerja sama prioritas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan akan terus memperkuat kerja sama di bidang ini, termasuk melalui berbagai inisiatif pada Working Group on Women's Economic Empowerment (WGBEE) yang baru dibentuk.
 - c. Sebagai anggota ekonomi APEC, Indonesia berpartisipasi aktif pada Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE), yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan partisipasi perempuan dalam perekonomian dan mengkoordinasikan kegiatan gender di APEC
- 5) Pelindungan WNI: Dalam konteks pelindungan WNI di luar negeri, upaya pemberdayaan gender akan terus diarusutamakan khususnya bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan dan anak-anak dari PMI yang masuk dalam kategori rentan.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Alat analisis gender yang digunakan: (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ada

- ☒ Gender Analysis Pathway (GAP)
- ☒ Problem Based Approach (PROBA)
- ☐ Model Harvard
- ☐ Model Moser
- ☒ Model SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)
- ☒ Lainnya

☐ Tidak ada

Catatan:

Perencanaan Responsif Gender yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri dilakukan melalui analisis permasalahan yang ada / problem based approach. Contoh ini dapat dilihat pada kegiatan pelindungan WNI, dan juga dalam keorganisasian sebagaimana dituangkan ke dalam poin arah kebijakan Kemenlu Nomor 10.

GAP dilaksanakan sebagai alat analisis dalam proses perencanaan di tingkat Eselon II.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Renstra UKE I? (masing-masing UKE I juga mengisi)

Nilai Maksimal: 25.00

Nilai: 25.00

Jawaban:

Ya. Jika Ya, apakah hasil analisis gender tertuang dalam:

- ☒ 1) Visi (Lampirkan)
- ☒ 2) Misi (Lampirkan)
- ☒ 3) Tujuan (Lampirkan)
- ☒ 4) Sasaran (Lampirkan)
- ☒ 5) Arah Kebijakan dan Strategi (Lampirkan)
- ☒ 6) Sasaran Program (Lampirkan)
- ☒ 7) Sasaran Kegiatan (Lampirkan)
- ☒ 8) Indikator Kinerja (Lampirkan)
- ☒ 9) Target Kinerja (Lampirkan)
- ☒ 10) Kerangka Pendanaan (Lampirkan)

☐ Tidak

Catatan:

1. Substansi gender terintegrasi ke dalam RENSTRA Kementerian Luar Negeri dan RENSTRA UKE I, yang tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2021.

2. Bukti dukung substansi gender yang tertuang dalam RENSTRA UKE I, sbb:

- Renstra Sekretariat Jenderal TA 2020 - 2024 (Halaman 7)
- Renstra Ditjen Aspasaf TA 2020 - 2024 (Halaman 46)
- Renstra Ditjen HPI (Halaman 37)
- Renstra Ditjen KS ASEAN (Halaman 20)
- Renstra BSKLN (Halaman 18)

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Persentase UKE I yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) UKE I? (lampirkan bukti)

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
- ☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh UKE I telah mengintegrasikan substansi gender dalam RENSTRA masing-masing.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam Renja K/L (UKE II)?

Nilai Maksimal: 15.00

Nilai: 15.00

Jawaban:

Ya. Jika Ya, apakah hasil analisis gender tertuang dalam:

- ☒ 1) Kegiatan
- ☒ 2) Sasaran Kegiatan
- ☒ 3) Indikator Kinerja Kegiatan
- ☒ 4) Klasifikasi Rincian Output (KRO)
- ☒ 5) Rincian Output (RO)

☐ Tidak

Catatan:

Substansi gender sudah terintegrasi ke dalam Renstra (lima tahunan) dan Renja K/L (UKE II) dalam RO.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Persentase UKE-II yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Renja K/L? (lampirkan bukti)

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh UKE II sudah mengintegrasikan substansi gender dalam Renja K/L masing-masing UKE II.

3. Penganggaran

1. Regulasi/Kebijakan Teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)

- ☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I
☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis
☐ 3) Lainnya
☐ Tidak

Catatan:

Kemlu telah memiliki regulasi teknis yang mengatur PUG dalam penganggaran. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang mekanisme penganggaran PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemlu; dan
2. Keputusan Menlu No. 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kemlu dan Perwakilan RI.

Di level teknis atau UKE I, terdapat Keputusan UKE I yang menetapkan pembentukan Pokja PUG dan tugas Pokja yang di antaranya adalah melakukan penganggaran responsif gender di masing-masing UKE I.

2. Anggaran Responsif Gender

Apakah K/L melakukan tagging ARG pada Rincian Output (RO) RENJA?

Sebutkan Rincian Output yang telah di tagging ARG pada RENJA UKE-II, menurut program.

UKE-II (setiap UKE II agar mengisi)

Uraikan pada MATRIKS!

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 25.00

Nilai: 25.00

Jawaban:

- ☒ Ya, Data tersedia
☐ Tidak. Data tidak tersedia

Catatan:

Ya, sudah dilakukan pada 32 dari 164 Rincian Output UKE II yang terdapat pada Renja Kementerian Luar Negeri

2. Anggaran Responsif Gender

Persentase RO yang di-tagging ARG?

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi dan tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 20%

Kementerian Luar Negeri secara prinsip telah menerapkan anggaran reponsif gender dan tagging RO, namun masih memiliki kendala sistem dimana 132 Perwakilan RI belum memiliki akses ke fitur tagging RO ARG pada aplikasi KRISNA.

2. Anggaran Responsif Gender

Jumlah RO yang di-tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya, Buktikan

☐ Tidak

Catatan:

Terdapat peningkatan terhadap tagging ARG Kemlu dari tahun 2020 ke 2021

2. Anggaran Responsif Gender

Persentase UKE-II yang melakukan tagging ARG?

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 2.10

Jawaban:

☒ Data tersedia

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 42%

Meskipun belum seluruh UKE II melakukan tagging ARG, namun program PUG dilaksanakan dengan mata anggaran yang tersedia.

2. Anggaran Responsif Gender

Jumlah UKE-II yang melakukan tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya, Buktikan

☐ Tidak

Catatan:

Tagging mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Anggaran Responsif Gender

Persentase nilai ARG K/L dibandingkan Total Anggaran K/L?

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 0.20

Jawaban:

☒ Data tersedia

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 2%

Kementerian Luar Negeri secara prinsip telah menerapkan anggaran reponsif gender dan tagging RO.

Rendahnya persentase nilai ARG Kemlu terhadap total anggaran juga disebabkan oleh masih terdapatnya kendala sistem dimana 132 Perwakilan RI belum memiliki akses ke fitur tagging RO ARG pada aplikasi KRISNA.

Meskipun persentase ARG relatif kecil dibandingkan total anggaran keseluruhan Kementerian Luar Negeri, namun berbagai kegiatan PUG tetap terlaksana dengan dukungan anggaran yang meningkat.

2. Anggaran Responsif Gender

Jumlah nilai ARG K/L mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Ya, Buktikan
☐ Tidak

Catatan:

Tagging mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
2020: Rp867.693
2021: Rp134.711.320.000

Saat ini juga sudah terdapat anggaran yang dialokasikan oleh Perwakilan RI terkait dengan kegiatan PUG, namun belum bisa dilakukan tagging anggaran karena adanya keterbatasan pelaksanaan tagging pada aplikasi KRISNA masing-masing Perwakilan RI, sehingga RO milik Perwakilan RI yang berisikan kegiatan yang terkait dengan PUG belum dapat muncul pada data rekapitulasi yang ditarik dari aplikasi Renja KRISNA.

4. Pelaksanaan

1. Prioritas K/L yang Responsif Gender

Apa prioritas K/L yang terkait dengan program Prioritas Nasional? Sebutkan!

Nilai Maksimal: 0.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☒ Ada. Sebutkan!
☐ Tidak ada

Catatan:

Kementerian Luar negeri memiliki 4 (empat) Program Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB
2. Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang Diterima
3. Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral.
4. Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara

Seluruh Pro-PN dimaksud memiliki unsur PUG dalam implementasinya.

1. Prioritas K/L yang Responsif Gender

Apakah prioritas K/L tersebut telah mengintegrasikan substansi gender?

Nilai Maksimal: 20.00

Nilai: 20.00

Jawaban:

- ☒ Ya
☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri telah mengintegrasikan substansi gender dalam berbagai program prioritas dalam skala nasional maupun kementerian, diantaranya:

1. Dalam Pro-PN Optimalisasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB, Kemlu terus memperjuangkan peningkatan jumlah peacekeepers perempuan. Pada tahun 2021, Indonesia menduduki posisi 5 teratas kontribusi peacekeepers perempuan sejumlah 20% dari total seluruh negara kontributor pada MPP PBB.
2. Partisipasi Kemlu mewakili Indonesia dalam Dewan HAM PBB termasuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan khususnya hak-hak perempuan dan anak-anak.
3. Peran Kemlu mewakili Indonesia dalam memperjuangkan ketersediaan akses vaksin COVID yang merata bagi seluruh dunia. Menlu RI juga turut berperan sebagai Co-Facilitator dalam COVAX AMC-Engagement.
4. Kemlu berperan aktif melindungi WNI di Luar Negeri di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral termasuk repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan.

2. Apa output dari masing-masing K/L dalam mendukung: (1) penurunan kesenjangan gender; (2) pemberdayaan perempuan (bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dll); (3) perlindungan hak perempuan (pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan); dan (4) peningkatan kualitas keluarga? (amanat CEDAW, SDGs, peraturan perundang-undangan terkait, dll)

Uraikan Output pada MATRIKS dan lampirkan!

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 180.00

Nilai: 180.00

Jawaban:

Ada

- ☒ Mendukung Penurunan Kesenjangan Gender
- ☒ Mendukung Pemberdayaan Perempuan
- ☒ Mendukung Perlindungan Hak Perempuan
- ☒ Mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga

☐ Tidak ada

Catatan:

MENDUKUNG PENURUNAN KESENJANGAN GENDER:

1. Peningkatan kapasitas dan awareness secara reguler melalui berbagai kegiatan, a.l.

- Peringatan hari Kartini dalam bentuk Talk Show: Kartini dan Kesetaraan Gender, Perspektif Diplomat Pria, pada 21 April 2021

Link berita: <https://www.medcom.id/internasional/asean/4KZzGV0K-melawan-paradigma-lama-mengenai-perempuan-penting-untuk-kemajuan-bangsa>

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4_2CdOWUfjI (MOHON AKSES LINK DIMAKSUD)

- Pelaksanaan Townhall Meeting “Membangun Lingkungan Kerja Profesional Tanpa Pelecehan Seksual” di Kementerian Luar Negeri pada 29 April 2021;
- Dihasilkannya beberapa kajian termasuk Penyusunan Kajian Isu Pasangan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
- Kegiatan KBRI Kuala Lumpur: Penyediaan akses terhadap fasilitas dan sarana Kesehatan berbasis gender bagi WNI di shelter KBRI Kuala Lumpur;
- Kegiatan KBRI Singapura: Startups, Women and Entrepreneurship in the Uncertain Global Market dan Self-love untuk Ketahanan Mental Perempuan;
- Kegiatan KBRI Kopenhagen: Diskusi Panel International Women’s Day 2021: Women in Leadership;
- Penyelenggaraan Webinar Knowledge Enhancement Series- Women, Peace, Security.

2. Dukungan di tataran global:

Kemlu aktif dalam mendorong isu kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan hak-hak perempuan. Topik-topik ini merupakan cross-cutting issue yang kerap muncul dalam berbagai agenda global, khususnya perlindungan hak-hak kelompok rentan, penanggulangan bencana dan perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan serta peacebuilding.

Kemlu mewakili Indonesia terlibat dalam kampanye UN Women menginisiasi dua kampanye global terkait isu gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu “HeForShe” (dimana Presiden Joko Widodo menjadi salah satu Impact Champion) dan “Generation Equality”. Kampanye HeForShe bertujuan untuk meningkatkan kontribusi kaum pria dalam mendorong kesetaraan gender, sementara Generation Equality menuntut persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam hal upah kerja, pembagian beban pekerjaan rumah tangga, penghapusan pelecehan seksual dan segala bentuk kekerasan (termasuk terhadap anak perempuan), layanan kesehatan sesuai kebutuhan, partisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kemlu mewakili Indonesia juga memiliki komitmen tinggi dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain dengan menjadi negara pihak berbagai instrumen pokok HAM internasional, khususnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan implementasi Deklarasi Beijing dan Platform for Action tahun 1995 serta hasil-hasil Sesi khusus ke-23 SMU PBB tahun 2000.

Pada kesempatan pertemuan perdana W20 dan EMPOWER (Desember 2021), Menlu RI menegaskan perlunya penciptaan lingkungan yang kondusif untuk memberikan kesempatan setara bagi perempuan untuk berkontribusi. Dicontohkan sejumlah langkah konkret Indonesia di tingkat global, termasuk peluncuran Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediator, misi women peacekeepers, dan pendirian Afghanistan-Indonesia Women’s Solidarity Network, untuk mendorong kontribusi perempuan di bidang peacebuilding dan ekonomi.

Di samping itu, Menlu RI dalam pembukaan Regional Forum of Women Peace Negotiators and Mediators (Juni 2021), mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Guna menjamin keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian, diperlukan setidaknya: dukungan politik dari tingkat tertinggi pemerintahan, dukungan teknis dan keahlian, serta dukungan terhadap penempatan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

3. Aktif terlibat dalam mendukung hak-hak perempuan Afghanistan untuk memperoleh pendidikan. Upaya dilakukan melalui tataran bilateral, koordinasi internal, dan multilateral, melibatkan pemangku kepentingan seperti tokoh, aktivis, dan akademisi perempuan.

Pertemuan pada 29 November 2021 melibatkan Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Qatar, HE Lolwah Al Khater, 5 tokoh perempuan Indonesia (aktivis dan akademisi), mendiskusikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Afghanistan, khususnya isu perempuan dan constructive engagement, dan apa langkah yang bisa dilakukan Indonesia.

MENDUKUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN:

1. Seleksi JPT dan pengangkatan pejabat Eselon III secara transparan, merit-based, dan non-diskriminatif (data pada matriks terlampir)
2. Pemberdayaan pengusaha perempuan, a.l. melalui penyelenggaraan “Indonesia-Latin America and the Caribbean (INALAC) Business Forum” setiap tahunnya.
3. Pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan

Kemlu mewakili Indonesia menaruh perhatian besar pada agenda DK PBB “Women, Peace and Security” (resolusi DK PBB 1325), didasari komitmen untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan, meningkatkan perhatiannya terhadap pencegahan konflik, promosi budaya damai, toleransi dan pengakuan peran perempuan dalam keluarga untuk mencegah radikalisasi, memastikan nol toleransi pelecehan seksual dalam situasi konflik, dan meningkatkan kontribusi negara anggota untuk peacekeeping operations, khususnya mempromosikan dan meningkatkan peran perempuan dalam proses perdamaian dan misi PKO.

MENDUKUNG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN:

1. Penjaminan hak untuk menyusui selama waktu kerja
2. Memerangi kekerasan seksual di tataran nasional dan global

Kemlu mewakili Indonesia telah bergabung dalam Preventing Sexual Violence Initiative (PSVI), suatu koalisi global inisiatif dari Pemerintah Inggris untuk memerangi kekerasan seksual dalam konflik melalui upaya advokasi dan program aksi di tingkat nasional, regional dan global. Kemlu juga mewakili Indonesia berpartisipasi aktif pada Global Summit to End Sexual Violence in Conflict di London. Inggris telah kembali meluncurkan inisiatif penyusunan Murad Code, yang dimaksudkan akan menjadi global code of conduct dalam penanganan kekerasan seksual terkait konflik, yang aman, survivor-centric, beretika dan efektif.

Sejalan dengan isu perlindungan migran yang tengah memperoleh perhatian besar dari masyarakat Indonesia, maka Kemlu mewakili Indonesia bersama Filipina sejak 1993 menginisiasi dan memfasilitasi resolusi dua tahunan "Violence against Women Migrant Workers". Diadopsinya resolusi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengangkat kepentingan nasional Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja migran, dalam memperkuat upaya perlindungan pekerja migran khususnya pekerja migran perempuan.

Upaya Kemlu mewakili Indonesia di bidang kesetaraan gender juga diarahkan untuk mendukung upaya mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender di seluruh bidang pembangunan prioritas, pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di tingkat internal organisasi, sejumlah upaya dilakukan untuk mendukung perlindungan hak perempuan, termasuk penjaminan hak untuk menyusui selama waktu kerja, penyediaan ruang laktasi, serta fasilitas daycare.

MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA:

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas keluarga, sejumlah kebijakan yang dilakukan termasuk:

1. Penerapan kebijakan WFH tambahan bagi pegawai perempuan yang baru melahirkan. Kebijakan khusus diberikan kepada pegawai perempuan yang baru melahirkan, guna mempermudah transisi dari masa cuti ke ritme bekerja dan mengurangi potensi postpartum depression.
2. Penyediaan fasilitas daycare, ruang laktasi, dan penjaminan hak untuk menyusui selama jam kerja. Akses ke fasilitas daycare memberikan waktu yang lebih fleksibel bagi pegawai untuk menghabiskan bersama keluarga, meningkatkan interaksi positif, dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Melalui penyediaan ruang laktasi, ibu bekerja dapat menyusui atau memerah ASI dengan lebih teratur dan lancar. Proses menyusui yang lancar dan nyaman berdampak positif pada kesehatan bayi, ikatan emosional antara ibu dan anak, serta memberikan dukungan psikologis bagi ibu bekerja. Seluruhnya sesuai dengan amanat di UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU 17/2023 tentang Kesehatan, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU 39/1999 tentang HAM.
3. Kebijakan terkait Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya. Home staff yang ditugaskan pada Perwakilan Rawan diberi kebebasan untuk memilih membawa anggota keluarga atau tidak selama masa penugasannya. Hal ini mempertimbangkan a.l. asas keselamatan.

Home Staff yang ditempatkan pada Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya juga dapat mengambil cuti karena alasan penting dalam rangka memulihkan kondisi kejiwaan, tanpa harus menunggu masa penugasan selama 1 tahun di Perwakilan. Cuti dimaksud tidak mengurangi hak cuti lainnya. Di samping itu, Home Staff pada Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA).

3. Partisipasi Masyarakat

Apakah masyarakat terlibat dalam pencapaian output sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan lampirkan!

Nilai Maksimal: 25.00

Nilai: 25.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan Nama Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Media, dan Akademisi yang mendukung masing-masing output; dan lampirkan bukti)

☒ Lembaga Masyarakat

☒ Media massa

☒ Dunia usaha

☒ Akademisi

☒ Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Dalam pencapaian output, Kementerian Luar Negeri telah melibatkan unsur masyarakat, akademisi, media massa, NGO dan Dunia Usaha, sebagai berikut:

1) Ditjen Amerika dan Eropa (Amerop): Media Massa yang meliput INA-LAC 2021 dan INA CEE 2021

2) Kegiatan Podcast Hari Kartini

- Melibatkan: channel Youtube Kementerian Luar Negeri dan laman resmi Kemlu sebagai peliput dan publikasi kegiatan.

3) Kegiatan Talkshow Kartini dan Kesetaraan Gender Perspektif Diplomat Pria (https://www.youtube.com/watch?v=4_2CdOWUfjI)

- Melibatkan: channel Youtube Kementerian Luar Negeri dan laman resmi Kemlu sebagai peliput dan publikasi kegiatan.

4) Webinar "Peran Diplomat Perempuan dalam Diplomasi Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri", yang diselenggarakan secara virtual, atas kerjasama Pokja PUG Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) dan Tim Pokja Ditjen Protokol dan Konsuler (Protkons).

Melibatkan: NGO sebagai penanggap, kelompok masyarakat (2 orang mantan PMI sebagai saksi yang telah memperoleh pelindungan dari Perwakilan RI), media massa: VOA Indonesia, liputan6, internasional media, channel Youtube Kementerian Luar Negeri dan laman resmi Kemlu sebagai peliput dan publikasi kegiatan.

5) Kegiatan Podcast Diplomacy Talk Ep. 1: Diplomasi dan Wanita (<https://www.youtube.com/watch?v=xuuvBz6hAVQ>)

6) Kegiatan Ditjen Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf):

a) APEC Business Advisory Council Meeting (ABAC)

b) Seorang Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia dan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Anggun Meylani Pohan, M.Psi pada webinar Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Ditjen Aspasaf sebagai Upaya Penciptaan Lingkungan Kerja yang Kondusif bagi Seluruh Pegawai

7) Kegiatan Ditjen Kerja Sama Multilateral (KSM):

- Unit Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual (PPKKI)

Melibatkan NGO/Ormas: UN Woman pada "Creative Economy For Sustainable Development: Let's Connect!"

- Unit Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan (HAMK)

Melibatkan Kelompok Masyarakat: Hollaback Jakarta

- Unit Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH)

Melibatkan Kowani, XL Axiata, Nexus3 Foundation

- Unit Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)

Melibatkan CSIS

- Unit Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB)

Melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, organisasi internasional, organisasi kemasyarakatan termasuk serikat pekerja migran, akademisi, dan peneliti yang menangani isu migrasi.

8) Kegiatan di Perwakilan RI:

- KBRI Ottawa: proses pembahasan pembaharuan naskah Plan of Action (PoA) RI-Kanada yang ditargetkan dapat memayungi berbagai bidang kerja sama bilateral ke depannya, termasuk yang berkaitan dengan upaya pemajuan peran dan partisipasi masyarakat yang berimbang dari aspek gender. Selain itu, menyusun sejumlah laporan hasil pengamatan mengenai kebijakan pemerintah Kanada yang memiliki keterkaitan erat dengan pengarusutamaan gender seperti mengenai Feminism Foreign Policy Kanada, serta isu gender mainstreaming lainnya seperti Women, Peace and Security (WPS), Women Mediator Network, dan Elsie Initiative for Women in Peace Operation.

-KBRI Sofia: tahun 2021 telah secara rutin melakukan pembinaan masyarakat Indonesia yang tinggal di ketiga negara akreditasi, yang sebagian besar perempuan Indonesia (yang menikah dengan WN setempat). Selain itu, Pelindungan Perempuan Indonesia juga menjadi prioritas bagi KBRI Sofia. KBRI Sofia telah bertindak optimal dalam menangani 2 kasus KDRT tahun 2021 yang menimpa WNI perempuan di Bulgaria dan Albania.

4. Program K/L yang berbasis kewilayahan dan berperspektif gender

Apakah K/L memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa/kelurahan? (contoh: Provinsi Peduli HAM, Kabupaten/Kota Sehat, dll)

Nilai Maksimal: 30.00

Nilai: 30.00

Jawaban:

Jika Ya, sebutkan

[X] 1) Tingkat Provinsi

[X] 2) Tingkat Kabupaten/Kota

[X] 3) Tingkat Desa/Kelurahan

[] Tidak

Catatan:

Kemenlu memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat Perwakilan RI di luar negeri.

Program dimaksud, antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelindungan WNI dan Warung Konsuler Rutin di Perwakilan RI. Secara umum, layanan yang diberikan termasuk asistensi dan pendampingan dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan pekerja wanita, serta memberi penampungan bagi PMI wanita yang bermasalah dan memerlukan penampungan. Kebijakan khusus yang dilakukan a.l. pemberian layanan prioritas bagi kelompok rentan yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak, penyandang disabilitas, orang sakit, dan orang lanjut usia.
2. Fasilitas Pemenuhan Akses Vaksin bagi seluruh WNI di wilayah kerja KBRI Baku dengan berkoordinasi pada setiap otoritas negara bagian di wilayah akreditasi. Pemenuhan akses vaksin Covid-19 dilakukan tidak hanya memperhatikan aspek gender, namun juga memperhatikan optimalnya upaya preventif dan upaya protektif WNI di wilayah akreditasi, termasuk bagi kelompok rentan (KBRI Baku).
3. Pemberdayaan pelaku bisnis dan pelaku kreatif perempuan. Kegiatan dimaksud, a.l. melalui pelibatan fashion designer perempuan Indonesia di Montreal dalam kegiatan pameran produk UMKM melalui batik dan National Women's Show Montreal bulan Oktober 2021 dan fasilitasi kunjungan sutradara film Indonesia yang ditampilkan di Toronto International Film Festival, yaitu Sdri. Kamila Andini untuk film YUNI yang mengusung tema mengenai ketanggungan kaum perempuan. (KBRI Ottawa)
4. Penguatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), a.l. melalui kegiatan:
* Startups, Women and Entrepreneurship in the Uncertain Global Market, 12 Oktober 2021 (KBRI Singapura) * Program Welcoming Program berupa sosialisasi bagi PMI yang baru tiba di wilayah akreditasi, serta
* Program During Stay, yakni pelatihan pembekalan kapasitas PMI di bidang finansial dan kewirausahaan, senantiasa melibatkan LSM atau mitra sebagai narasumber dengan mempertimbangkan kebutuhan PMI (KJRI Hong Kong).
5. Pembinaan masyarakat Indonesia yang tinggal di ketiga negara akreditasi, yang sebagian besar perempuan Indonesia, khususnya bagi yang menikah dengan WN setempat (KBRI Sofia).

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nilai Maksimal: 15.00

Nilai: 15.00

Jawaban:

Ya

☒ 1) Bidang Pendidikan

☒ 2) Bidang Kesehatan

☒ 3) Bidang Ekonomi

☐ Tidak

Catatan:

Bukti dukungan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung terlaksananya Kesetaraan Gender telah tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi PUG dari Satker Pusat dan Perwakilan.

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi:

>> Kutipan Renstra Kemenlu 2020-2024 :

"Dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri, upaya pemberdayaan gender akan terus diutamakan khususnya bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan dan anak-anak dari PMI yang masuk dalam kategori rentan. Diplomasi, kerja sama dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar bagi anak-anak PMI di luar negeri, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan keterampilan PMI di Perwakilan RI di luar negeri, penyusunan pedoman manajemen shelter (tempat singgah sementara/TSS) dan pelayanan publik yang sensitif gender dan pengawasan implementasinya, serta peningkatan kapasitas pejabat fungsional diplomat terkait isu-isu gender adalah beberapa upaya penting dalam memastikan perlindungan WNI di luar negeri yang inklusif."

"Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri melalui forum IORA sepanjang tahun 2017-2018 diantaranya menghasilkan berbagai perjanjian kerja sama strategis dan konsolidasi kelembagaan yang meliputi berbagai bidang, seperti: countering terrorism and violent extremism, blue economy, pengembangan perikanan berkelanjutan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, persamaan gender dan penguatan ekonomi kaum wanita"

"Di IORA, Indonesia merupakan salah satu negara pendorong (leading countries) pada area kerja sama prioritas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan akan terus memperkuat kerja sama di bidang ini, termasuk melalui berbagai inisiatif pada Working Group on Women's Economic Empowerment (WGBEE) yang baru dibentuk.

Sebagai anggota ekonomi APEC, Indonesia berpartisipasi aktif pada Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE), yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan partisipasi perempuan dalam perekonomian dan mengkoordinasikan kegiatan gender di APEC"

Kutipan Laporan PUG KJRI Hongkong TA 2021 :

"Program Warung Layanan Terpadu, Deteksi Dini Kanker Payudara, pemeriksaan kesehatan bagi PMI dengan memperhatikan aspek gender termasuk kelompok rentan seperti anak-anak atau WNI sakit"

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya

☒ Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

☒ Bidang Ekonomi (sama dengan butir 5a.3)

☒ Peningkatan Profesionalisme Perempuan

☐ Tidak

Catatan:

Bukti dukungan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung terlaksananya Kesetaraan Gender telah tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2021.

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam bidang Politik dan Pengambilan Keputusan, Bidang Ekonomi dan Peningkatan Profesionalisme Perempuan:

>>kutipan Renstra 2020-2024 >>

1) Bidang Politik Keamanan: Isu women, peace and security, akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga akan terus mendorong dan mempromosikan peran perempuan dalam perdamaian melalui implementasi ASEAN Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security, UN Resolution 1325: Women, Peace and Security, dan komitmen ASEAN-IPR terhadap pengarusutamaan gender

2) Bidang Ekonomi dan Peningkatan Profesionalisme Perempuan : Peningkatan keterlibatan pelaku usaha perempuan dilakukan melalui berbagai forum bisnis maupun organisasi/forum internasional.

- Kementerian Luar Negeri secara reguler menyelenggarakan "Indonesia-Latin America and the Caribbean (INALAC) Business Forum" setiap tahunnya. Berbagai hal lain yang dicapai melalui kegiatan ini adalah pengarusutamaan gender dan penguatan ekonomi pengusaha, termasuk pengusaha perempuan dengan memperluas jaringan antara organisasi perempuan yang terkait dengan perdagangan internasional.

- Di IORA, Indonesia merupakan salah satu negara pendorong (leading countries) pada area kerja sama prioritas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan akan terus memperkuat kerja sama di bidang ini, termasuk melalui berbagai inisiatif pada Working Group on Women's Economic Empowerment (WGBEE) yang baru dibentuk.

- Sebagai anggota ekonomi APEC, Indonesia berpartisipasi aktif pada Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE), yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan partisipasi perempuan dalam perekonomian dan mengkoordinasikan kegiatan gender di APEC

Kemlu memberikan kesempatan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3, peningkatan kapasitas pegawai perempuan, keterwakilan perempuan dalam struktural dan juga Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri.

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nilai Maksimal: 0.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

☒ Bidang Kesehatan (sama dengan butir 5a.2)

☒ Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan (sama dengan butir 5b.1)

☒ Bidang Ekonomi (sama dengan butir 5a.3)

☒ Bidang Pendidikan (sama dengan butir 5a.1)

☐ Tidak

Catatan:

Bukti dukungan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung terlaksananya Kesetaraan Gender telah tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2021.

Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dalam Bidang Kesehatan, Politik dan Pengambilan Keputusan, Bidang Ekonomi, Pendidikan:

>>kutipan Renstra Kemlu 2020-2024

"Di IORA, Indonesia merupakan salah satu negara pendorong (leading countries) pada area kerja sama prioritas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan akan terus memperkuat kerja sama di bidang ini, termasuk melalui berbagai inisiatif pada Working Group on Women's Economic Empowerment (WGWE) yang baru dibentuk.

Sebagai anggota ekonomi APEC, Indonesia berpartisipasi aktif pada Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE), yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan partisipasi perempuan dalam perekonomian dan mengkoordinasikan kegiatan gender di APEC"

"Dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri, upaya pemberdayaan gender akan terus diarusutamakan khususnya bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan dan anak-anak dari PMI yang masuk dalam kategori rentan. Diplomasi, kerja sama dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar bagi anak-anak PMI di luar negeri, penyelenggaraan

kegiatan pemberdayaan serta peningkatan keterampilan PMI di Perwakilan RI di luar negeri, penyusunan pedoman manajemen shelter (tempat singgah sementara/TSS) dan pelayanan publik yang sensitif gender dan pengawasan implementasinya, serta peningkatan kapasitas pejabat fungsional diplomat terkait isu-isu gender adalah beberapa upaya penting dalam memastikan perlindungan WNI di luar negeri yang inklusif."

Isu women, peace and security, akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga akan terus mendorong dan mempromosikan peran perempuan dalam perdamaian melalui implementasi ASEAN Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security, UN Resolution 1325: Women, Peace and Security, dan komitmen ASEAN-IPR terhadap pengarusutamaan gender.

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Penurunan angka kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan SE Menlu No/31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Bukti dukung sebagaimana terlampir.

Sebagai tindak lanjut, Kemlu telah membentuk tim penerima pengaduan tindak kekerasan seksual pada masing-masing Satker dan Perwakilan RI di luar negeri. Kemlu juga memiliki layanan konseling bagi korban tindak kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Upaya penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan juga sudah direfleksikan pada Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2021.

>>Kutipan Renstra Kemlu 2020-2024

"Arah Kebijakan peningkatan pengaruh kepemimpinan dan peran Indonesiadalam Kerja Sama Internasional, memiliki strategi antara lain:

- Memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka kerja sama bilateral, regional dan multilateral, terutama melalui implementasi Instrumen HAM internasional seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasiterhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women/CEDAW), serta komitmen berbagai kesepakatan internasional seperti BPfA dan SDGs.

- Mempromosikan perlindungan pekerja migran, khususnya perempuan, termasuk memfasilitasi berbagai resolusi PBB di Dewan HAM PBB maupun Komite III MU PBB untuk menghilangkan kekerasan terhadap pekerja migran.

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Lainnya (sebutkan, yang terkait)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya

☐ Tidak

Catatan:

Bukti dukungan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung terlaksananya Kesetaraan Gender telah tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2021.

>> Kutipan Renstra Kemlu 2020-2024

Arah kebijakan peningkatan infrastruktur diplomasi berbasis teknologi informasi, memiliki strategi antara lain:

" Memperkuat pengarusutamaan gender dalam organisasi, khususnya penganggaran yang mengadopsi pengarusutamaan gender, dalam rangka membangun sistem manajerial dan infrastruktur yang responsif terhadap isu pengarusutamaan tersebut. "

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?

Ruang Laktasi

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya, Lampirkan

☐ Tidak ada

Catatan:

Ruang Laktasi Kementerian Luar Negeri pada saat pandemi mengikuti operasional kantor yang menerapkan WFH dan WFO

Ruang Laktasi pada Ruang Pelayanan di KJRI Johor Bahru

<https://youtu.be/kZ-8i9qxqBU?si=AnCIlaPnoMZ3uVjD> (MOHON AKSES LINK TERLAMPIR)

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?

Tempat Penitipan Anak

Nilai Maksimal: 20.00

Nilai: 20.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan!

☐ Tidak ada

Catatan:

Daycare Kementerian Luar Negeri mengalami peningkatan kualitas dengan melakukan renovasi dan pembaharuan gedung.

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?

Layanan Perlindungan Hak Perempuan internal K/L (informasi, pengaduan, konseling, layanan rujukan, hotline, dll)

Nilai Maksimal: 20.00

Nilai: 20.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan!

☐ Tidak ada

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri memiliki layanan perlindungan hak perempuan yang sangat komprehensif. Termasuk hotline pelaporan yang didukung oleh Tim Inspektorat Jenderal dan BSDM.

Kemlu telah memiliki hotline khusus pengaduan tindakan pelecehan seksual yang dikelola langsung oleh Biro SDM dengan nomor: 0811-865-1654.

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan Perlindungan Hak Perempuan setiap tahun? (butir 6a, 6b, 6c)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Data tersedia. Sebutkan!

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Saat pandemi sebagian satker masih menjalankan WFH dan peraturan protokol kesehatan yang ketat sehingga penggunaan fasilitas terbatas dan dirujuk melalui layanan online (daring)

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?

Sarana Inklusi dan/atau Disabilitas (Ramp, TKD)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Sarana & Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Kementerian Luar Negeri:

1. Ramp/Bidang Landai;
2. Parkir Khusus Untuk Penyandang Disabilitas;
3. Toilet Khusus Untuk Penyandang Disabilitas;
4. Lift bagi Penyandang Disabilitas.

Toilet Disabilitas dan Mushola terpisah pada Ruang Pelayanan KJRI Johor Bahru

<https://youtu.be/kZ-8i9qxqBU?si=GUm6r6MAfzXjRtdk>

Sarana & Prasarana yang Responsif Gender di Kementerian Luar Negeri seperti Mushola dan tempat wudhu terpisah antara pria dan wanita.

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?

Lainnya, sebutkan!

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Sarana dan Prasarana Lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja pegawai:

1. Lobi/ ruang tunggu yang nyaman;
2. Outdoor meeting space;
3. Fasilitas kesehatan;
4. Kantin yang bersih dan nyaman;
5. Fasilitas One Day Service untuk layanan kepegawaian, kekonsuleran dan keuangan.
6. Parkir untuk penyandang disabilitas
7. Pemisahan tempat wudhu dan ruang ibadah bagi wanita dan pria

7. Penguatan Penyelenggaraan PUG ke eksternal

Apakah K/L telah melakukan penguatan (eksternal) dalam Penyelenggaraan PUG?

Nilai Maksimal: 50.00

Nilai: 50.00

Jawaban:

Ya, dalam bentuk: (Lampirkan)

☒ 1) Advokasi dan sosialisasi

☒ 2) Bimbingan Teknis

☒ 3) Pendampingan

☒ 4) Modeling

☒ 5) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Penguatan dalam penyelenggaraan PUG dilaksanakan a.l. melalui kegiatan berikut:

- Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 31 Maret 2021 oleh KBRI Bogota;
- Peluncuran dan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Luar Negeri RI Nomor SE/00031/KP/1 1/2021/1 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI pada tanggal 26 November 2021 oleh KBRI Beijing;
- Sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LAIXII/2021/01 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI pada tanggal 2 Desember 2021 oleh KBRI Havana;
- Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender serta Penyusunan Laporan Pengarusutamaan Gender pada tanggal 21 Desember 2021 oleh KBRI Windhoek;
- Pendampingan hukum bagi orang tua kasus anak WNI korban modern slavery dimana Ibu kandung menjadi pihak terberat yang harus memberikan burden of proof atas proses pemindahan hak asuh (Kasus sedang berjalan a.n. KMM, KBRI London);
- Pendampingan dan pencegahan kekerasan KDRT khususnya WNI kawin campur di Prancis (KBRI Paris).

7. Penguatan Penyelenggaraan PUG ke eksternal

Apakah K/L telah melakukan penguatan (eksternal) dalam Penyelenggaraan PUG?

Nilai Maksimal: 30.00

Nilai: 30.00

Jawaban:

Ya, dilakukan pada:

- ☒ a) PD tingkat provinsi
- ☒ b) PD tingkat kabupaten/kota
- ☒ c) Pemerintah Desa
- ☒ d) Masyarakat

☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri senantiasa melaksanakan berbagai kegiatan penguatan penyelenggaraan PUG ke eksternal, diantaranya adalah sbb:

- Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun dalam rangka Penguatan Jejaring dan Kerja Sama Sektor Komoditas guna mendukung Diplomasi Ekonomi. Salah satu hasil diskusi pada kunjungan kerja ke perkebunan kelapa dan UMKM produk kelapa olahan di Bali, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata produsen komoditas kelapa di Bali mempekerjakan masyarakat sekitar, khususnya perempuan, sehingga membantu perbaikan ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

- Penyelenggaraan Hassan Wirajuda Pelindungan Award (HWP) yang sensitif gender. Dalam seluruh rangkaian kegiatan HWP, Kemlu memastikan kesetaraan gender pada unsur panitia pelaksana, juri, nominator penerima penghargaan dan isu/kasus yang diselesaikan dan diperjuangkan. Sebanyak 36% penerima HWP adalah perempuan. Para penerima HWP adalah diplomat, jurnalis, kepala desa, PNS, dan masyarakat madani.

- Unit Direktorat Sosbud OINB juga melibatkan Pemda dan organisasi masyarakat setempat, dalam mengadakan kegiatan yang mengangkat isu migrasi yang mengintegrasikan substansi sensitif gender.

Kegiatan yang dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri antara lain:

- KBRI Singapura: Startups, Women and Entrepreneurship in the Uncertain Global Market dan Self-love untuk Ketahanan Mental Perempuan.

- KBRI Kopenhagen: Diskusi Panel International Women's Day 2021: Women in Leadership.

- KBRI Ottawa: pembahasan pembaharuan naskah Plan of Action (PoA) RI-Kanada yang ditargetkan dapat memayungi berbagai bidang kerja sama bilateral ke depannya, termasuk yang berkaitan dengan upaya pemajuan peran dan partisipasi masyarakat yang berimbang dari aspek gender.

5. Pemantauan

1. PUG dalam Pemantauan

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk memantau penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pemantauan)?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya, sebutkan!

- ☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I
- ☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis
- ☐ 3) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kemlu telah memiliki regulasi teknis yang mengatur PUG dalam pemantauan. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang mekanisme pemantauan PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu Peraturan Menlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemlu.

Kementerian Luar Negeri pada tanggal 3 Desember 2021 telah menerbitkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/XII/2021/01 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Keputusan Menlu dimaksud, khususnya Bab IV tentang Pemantauan dan Evaluasi PUG, halaman 25-29 memberikan pedoman tentang mekanisme pemantauan dan evaluasi PUG di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, termasuk mekanisme koordinasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Di level teknis atau UKE I, terdapat Keputusan UKE I yang menetapkan pembentukan Pokja PUG dan tugas Pokja yang di antaranya adalah mengimplementasikan pemantauan di masing-masing UKE I.

1. PUG dalam Pemantauan

Apakah K/L melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan PUG secara berkala?

Nilai Maksimal: 15.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya

☐ 1) Setiap triwulan

☒ 2) Setiap semester

☐ 3) Tahunan

☐ Tidak

Catatan:

Sesuai dengan Kepmenlu Juknis PUG Tahun 2021, Forum Komunikasi PUG Kementerian Luar Negeri secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG sedikitnya setiap semester.

Pemantauan Semester I dilakukan pada Semester II tahun berjalan, sedangkan pemantauan Semester II dilakukan Semester I tahun berikutnya.

6. Evaluasi

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk mengevaluasi Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Evaluasi)?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan)

☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I

☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis

☐ 3) Lainnya

☐ Tidak ada

Catatan:

Kemlu telah memiliki regulasi teknis yang mengevaluasi penyelenggaraan PUG. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang mekanisme evaluasi PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemlu; dan
2. Keputusan Menlu No. 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kemlu dan Perwakilan RI.

Di level teknis atau UKE I, terdapat Keputusan UKE I yang menetapkan pembentukan Pokja PUG dan tugas Pokja yang di antaranya adalah mengimplementasikan evaluasi PUG di masing-masing UKE I.

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah K/L melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun?

Persentase UKE I yang dievaluasi

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Lampirkan!
☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Pokja PUG melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUG seluruh UKE I setiap tahun.

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah K/L melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun?

Persentase UKE II yang dievaluasi

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Lampirkan!
☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Pokja PUG melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUG seluruh UKE II setiap tahun.

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah hasil evaluasi Penyelenggaraan PUG ditindaklanjuti?

Persentase UKE I yang menindaklanjuti hasil evaluasi

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Lampirkan!
☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh evaluasi penyelenggaraan PUG UKE I telah ditindaklanjuti.

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah hasil evaluasi Penyelenggaraan PUG ditindaklanjuti?

Persentase UKE II yang menindaklanjuti hasil evaluasi

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Lampirkan!
☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh evaluasi penyelenggaraan PUG UKE II telah ditindaklanjuti.

1. PUG dalam Evaluasi

Apa saja penghargaan terkait Penyelenggaraan PUG, yang diperoleh K/L selama satu tahun terakhir?

Nilai Maksimal: 0.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya, sebutkan dan lampirkan!

☒ Tingkat Internasional

☒ Tingkat Nasional

☐ Tidak ada

Catatan:

Secara khusus, Kemlu diwakili melalui Gender Champions Menteri Luar Negeri memiliki peran yang diakui antara lain dalam forum internasional, melalui peran aktif dalam G20 Ministerial Conference on Women Empowerment dan Action for Peacekeeping (A4P) Women Peace and Security Champions Tahun 2021. Selain itu Indonesia juga menjadi negara yang mengusung artikel mengenai peningkatan peran perempuan dan perlindungan perempuan dari tindak pidana pelecehan seksual pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Pada tahun 2019, Kemlu juga meraih penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya.

7. Pengawasan

1. PUG dalam Pengawasan

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pengawasan)?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan)

☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I

☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis

☐ 3) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki regulasi untuk pengawasan internal atas penyelenggaraan PUG. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang pengawasan PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan

2. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Pengawasan internal atas penyelenggaraan PUG merupakan salah satu tugas dari Pokja PUG, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 11 Permenlu No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Keputusan Inspektur Jenderal No. 00047/B/PW/02/2021/67/11 secara spesifik memberikan tugas kepada Pokja PUG Itjen untuk: memantau, memonitor dana mengevaluasi penerapan PUG di setiap Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri.

Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri juga tengah menyiapkan konsep Keputusan Irjen mengenai Petunjuk Teknis Pengawasan terhadap PUG Kemenlu dan Perwakilan RI.

1. PUG dalam Pengawasan

Apakah APIP/Inspektorat memberikan rekomendasi Penyelenggaraan PUG? (Kelengkapan dokumen kepatuhan dan kualitas)?

Nilai Maksimal: 20.00

Nilai: 20.00

Jawaban:

Ya, lampirkan!

☒ 1) Rekomendasi PUG dalam Perencanaan (Integrasi Isu Gender dalam Renstra, dan Renja)

☒ 2) Rekomendasi PUG dalam Penganggaran (Integrasi Isu Gender dalam RKAKL)

☒ 3) Rekomendasi PUG dalam Pelaksanaan

☐ Tidak

Catatan:

APIP bersama Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri memberikan rekomendasi penyelenggaraan PUG Kementerian Luar Negeri dalam tahap perencanaan dan penganggaran.

Dalam kaitan ini, rekomendasi dilakukan saat menilai kelengkapan dokumen kepatuhan dan kualitas pada tahap perencanaan dan penganggaran, khususnya dokumen GBS dari PUG Satker sebelum proses tagging ARG.

Sementara itu pada tahap pelaksanaan, APIP turut memberikan masukan dalam pelaksanaan PUG melalui Rapat Forum Komunikasi PUG Kementerian Luar Negeri yang dihadiri seluruh wakil Satker, termasuk APIP.

1. PUG dalam Pengawasan

Persentase UKE II yang telah dilakukan audit internal atas Penyelenggaraan PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 20.00

Nilai: 6.80

Jawaban:

☒ Data tersedia

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai=34%

Tahun 2021 terdapat 20 dari total 59 UKE II yang diaudit dalam penyelenggaraan PUG Kementerian Luar Negeri.

8. Pelaporan

1. PUG dalam Pelaporan

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pelaporan atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pelaporan)?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan)

☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I

☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis

☐ 3) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki regulasi untuk pelaporan atas penyelenggaraan PUG Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang mekanisme pelaporan PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
2. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Di level teknis atau UKE I, terdapat Keputusan UKE I yang menetapkan pembentukan Pokja PUG dan tugas Pokja yang di antaranya adalah melaporkan secara berkala pelaksanaan PUG di masing-masing UKE I.

1. PUG dalam Pelaporan

Apakah K/L telah melaporkan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN) K/L?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya, Lampirkan

☐ Tidak

Catatan:

Kemlu telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PUG Tahun 2021 secara Komprehensif baik pada lingkup Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan RI

1. PUG dalam Pelaporan

Persentase UKE I yang telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN)

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi dan tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Data tersedia

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh UKE I telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam LAKIP.

INOVASI

Nilai Maksimal: 100.00

9. INOVASI

1. Inovasi Penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L memiliki inovasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan Gender sesuai tugas pokok dan fungsi K/L?

Nilai Maksimal: 100.00

Nilai: 100.00

Jawaban:

☒ Ya, Jelaskan dan Lampirkan buktinya

☐ Tidak

Catatan:

Pada tahun 2021, Kementerian Luar Negeri memiliki berbagai inovasi dalam mewujudkan Kesetaraan gender, baik internal (dalam bentuk inovasi pada aspek kebijakan, perbaikan infrastruktur, capacity building) maupun inisiatif di forum bilateral, regional, dan multilateral, yaitu:

INOVASI KESETARAAN GENDER INTERNAL**A. Inovasi pada Aspek Kebijakan**

1. Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Luar Negeri RI Nomor SE/00031/KP/11/2021/03 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kemlu;

Terbitnya Surat Edaran Menteri Luar Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI merupakan suatu terobosan dan komitmen Kemlu dalam mewujudkan lingkungan kerja di Kemlu dan Perwakilan RI yang lebih aman, nyaman dan kondusif, bebas dari diskriminasi dan dari tindakan pelecehan seksual.

2. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/IA/XII/2021/01 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Luar Negeri yang terkait dengan pengarusutamaan gender, Kemenlu menyusun Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

3. Dihasilkannya Penyusunan Kajian/Reviu Kebijakan terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) Pasangan Suami Istri Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri.

Kajian mengangkat isu mengenai permasalahan yang dihadapi pasutri Kemlu, kendala yang dihadapi ketika CLTN, dan dampak CLTN bagi pegawai yang bersangkutan. Sebagai tindak lanjutnya, telah dibentuk Task Force CLTN guna membahas lebih lanjut dengan Unit Kerja terkait untuk mendapatkan output yang konkrit, sebagaimana disampaikan dalam rekomendasi kajian. Lebih lanjut, telah dilakukan Rapat Pembahasan dengan Badan Kepegawaian Nasional guna mengkomunikasikan kekhususan penugasan serta mutasi pegawai Kementerian Luar Negeri perlu untuk turut ditindaklanjuti. Mengenai hal ini, Badan Kepegawaian Nasional merespon positif terkait keunikan mekanisme mutasi luar negeri di Kemlu dan perlu penyesuaian masa tunggu dalam pemberian cuti di luar tanggungan negara bagi pegawai Kemlu.

4. Pengembangan sistem dan penguatan kelembagaan pelayanan dan perlindungan seperti pembangunan sistem dan teknologi informasi pelayanan dan perlindungan melalui Portal Peduli WNI dan Safe Travel. Kedua aplikasi tersebut mendukung sistem pendataan dan monitoring, yang pada gilirannya memudahkan Kementerian dan Perwakilan RI dalam melakukan penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri.

B. Infrastruktur

5. Kemlu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dari tindakan pelecehan seksual melalui tindakan preventif, diantaranya dengan memperhatikan aspek infrastruktur yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual. Terdapat dua aspek infrastruktur yang diperhatikan, yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur non fisik (jaringan).

Dari sisi infrastruktur fisik, Kemlu telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual. Kemlu telah memastikan penerangan infrastruktur di area jalan, koridor, basement, dan ruang kerja beroperasi dengan baik, serta pengoperasian CCTV pada titik tempat strategis. Sarpras tersebut terus dipantau agar tetap dapat beroperasi dengan baik dan ditingkatkan kualitas sarpras.

Untuk menghindari terjadinya tindakan pelecehan seksual di ruang kerja, Kemlu telah melakukan renovasi ruang kerja yang ramah gender dengan menggunakan sekat kaca, sehingga mengurangi area yang tidak terlihat. Terdapat penutup meja bagian bawah/kaki dari arah depan untuk menghalangi pandangan dan memastikan kenyamanan pegawai perempuan. Selain itu, Kemlu juga telah memisahkan lokasi toilet pria dan wanita serta menyediakan area Ibu Menyusui secara khusus di dalam Area Taman Asuh Ramah Anak Kemlu.

C. Capacity Building

6. Sebagai strategi penerapan PUG untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, Kementerian Luar Negeri mengadakan Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), khususnya bagi

anggota Forum Komunikasi PUG, Manajer Kinerja Organisasi (MKO)/Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO), dan Pengelola Keuangan di Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan RI pada tanggal 9 April 2021 dan Bimtek Lanjutan pada tanggal 23 April 2021 dan 20-21 Desember 2021. Kementerian Luar Negeri juga telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi PPRG bagi 36 auditor, tanggal 30-31 Agustus 2021. Dengan demikian, secara kelembagaan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan pengembangan kapasitas bagi SDM nya untuk melaksanakan implementasi PUG secara komprehensif, dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Selain itu, pada tahun 2021, terdapat 41 orang SDM bidang Hukum yang tersebar di berbagai Satker di Kementerian Luar Negeri yang telah terlatih substansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Selain Bimtek PPRG, Kemlu juga mengadakan berbagai kegiatan untuk mencapai pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Kemlu dan Perwakilan RI sebagai berikut: a) Peringatan hari Kartini dalam bentuk Talk Show: Kartini dan Kesetaraan Gender, Perspektif Diplomat Pria pada 21 April 2021; b) Pelaksanaan Townhall Meeting "Membangun Lingkungan Kerja Profesional Tanpa Pelecehan Seksual" di Kementerian Luar Negeri pada 29 April 2021; c) Berbagai Webinar termasuk webinar "Peran Diplomat Perempuan dalam Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri" di Kementerian Luar Negeri; d) Kegiatan KBRI Kuala Lumpur: Penyediaan akses terhadap fasilitas dan sarana Kesehatan berbasis gender bagi WNI di shelter KBRI Kuala Lumpur; e) Kegiatan KBRI Singapura: Startups, Women and Entrepreneurship in the Uncertain Global Market dan Self-love untuk Ketahanan Mental Perempuan; f) Kegiatan KBRI Kopenhagen: Diskusi Panel International Women's Day 2021: Women in Leadership.

INISIATIF DI FORUM BILATERAL, REGIONAL, DAN MULTILATERAL/GLOBAL

D. Inisiatif di Forum Bilateral

7. Forum Bilateral (Afghan Women)

Kemlu menginisiasi Indonesia – Afghanistan Women Parliamentarian "Empowering Women and Supporting Peace Process", 23 Juni 2021; Pertemuan Afghanistan-Indonesia Women's Solidarity Network dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas untuk Perempuan Afghanistan di Indonesia, dan bersama Kementerian Luar Negeri Qatar membahas rencana kolaborasi untuk isu perempuan di Afghanistan tanggal 29 November 2021.

8. PUG/Isu Gender dalam Diplomasi dan Pelindungan WNI di Luar Negeri – ProPN:

- Penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri, terutama pembebasan WNI yang terancam hukuman mati. Selama lima tahun terakhir, Kemenlu dan Perwakilan RI telah menyelesaikan 73.503 kasus; dimana sebanyak 297 WNI telah diselamatkan dari hukuman mati.
- Pemberian fasilitas bantuan hukum bagi WNI bermasalah di luar negeri.
- Pemberian fasilitas pemulangan WNI diantaranya Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah, WNI korban Tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri, dan anak-anak tidak berdokumen di luar negeri. Sebanyak 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatiasi.
- Evakuasi 16.432 WNI dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia.
- Pengembalian hak-hak finansial WNI berupa sisa gaji, uang diyat, dan asuransi senilai Rp. 574 milyar.
- Pembebasan 43 orang WNI yang disandera di perairan Filipina Selatan.

E. Inisiatif di Forum Regional

9. Pembentukan ASEAN DO-No-Harm Guide for Frontline Responders: Safeguard the Rights of Victims of Trafficking in Persons'

Kemlu RI, di bawah kerangka ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), telah terlibat dalam pembentukan ASEAN Do-No-Harm Guide for Frontline Responders: Safeguarding the Rights of Victims of Trafficking in Persons'. Panduan ini merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas responden garis depan, terutama penegak hukum, dalam pemberian layanan dukungan dan perlindungan korban TPPO dengan cara yang penuh kasih, peka gender dan tidak menghakimi.

10. 12th ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMMRDPE), the 18th ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (18th SOMRDPE) and Its Related Meeting

Pada rangkaian pertemuan tersebut, Kemlu mewakili Indonesia menyampaikan pentingnya partisipasi aktif dan kolaborasi RDPE untuk dalam pengarusutamaan gender dan operasionalisasi ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework 2021-2025.

11. Keterlibatan dalam 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMWW) and Related Meetings

Pada pertemuan tersebut, Kemlu mewakili Indonesia menyampaikan dukungannya untuk pembuatan Regional Plan of Action on Women, Peace and Security (RPA on WPS) dan kesediannya untuk menjadi Co-Chair bersama Kamboja dalam pertemuan pembahasan konsep RPA on WPS.

F. Inisiasi Kemlu di Forum Multilateral/ Global

Sejumlah inisiasi Kemlu di Forum Multilateral/Global yang memberi manfaat untuk Pemri, diantaranya:

12. Terkait COVID Recovery, Kemlu RI menyusun "Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Chile, Meksiko, dan Peru dalam rangka Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid -19", bekerja sama dengan UPN Veteran Jatim; FGD Peningkatan Kapasitas Produksi dan Bahan Baku Vaksin Covid -19 (yang melibatkan K/L terkait dan pemangku kepentingan seperti perusahaan farmasi), 22 April 2021; dan menginisiasi program kegiatan Webinar ASEM Day "Getting Ready for the New Normal: ASEM Strategies to Navigate the Post-COVID-19 Pandemic Recovery", 5 April 2021.

13. Economic Intelligence untuk UMKM di daerah

Pada Pembukaan Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia Ke-3 (the 3rd INA-LAC Business Forum) 2021, Menteri Luar Negeri RI secara resmi meluncurkan platform digital INA-ACCESS sebagai platform diplomasi ekonomi yang menampilkan lebih dari 300 permanent exhibitions secara virtual melibatkan ribuan jenis produk, serta proyek-proyek investasi yang sudah siap. Lebih dari 50 persen perusahaan yang menampilkan produk ekspor potensial adalah dari sektor UMKM. Platform INA-ACCESS mengintegrasikan promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi (TTI) Indonesia dengan mitra potensial dan akan terus dikembangkan menjadi media interaksi yang efektif dan kredibel bagi sektor bisnis. Platform ini menjadi e-catalogue berbasis search engine yang berorientasi pada penciptaan big data (www.ina-access.com).

14. MPP PBB Women Peacekeepers

Kemlu mengadakan Focus Group Discussion Potensi kerja sama Indonesia untuk Peningkatan Peran Peacekeepers Perempuan melalui Elsie Initiative on Women in Peace Operations, Banten, 23 Maret 2021. Kegiatan menjaring masukan dari Kementerian/ Lembaga, think tank dan akademisi terkait relevansi

Elsie Initiative dengan kepentingan Indonesia; Identifikasi potensi kerja sama dalam memajukan peran peacekeepers perempuan di bawah kerangka Elsie Initiative.

15. KBRI/PTRI Wina mendorong diadopsinya Resolusi UNIDO, Gender Equality and Empowerment of Women

Pada Sesi ke-19 General Conference of the United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO), di Wina, Austria, 29 November - 3 Desember 2021, KBRI/PTRI Wina mendorong diadopsinya Resolusi UNIDO, Gender Equality and Empowerment of Women yang menekankan pada upaya pengarusutamaan gender dalam program, serta aktifitas internal organisasi UNIDO dan upaya meningkatkan peran perempuan di dalam personel UNIDO.

16. Kemlu aktif dalam mendorong isu kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan hak-hak perempuan. Topik-topik ini merupakan cross-cutting issue yang kerap muncul dalam berbagai agenda global, khususnya perlindungan hak-hak kelompok rentan, penanggulangan bencana dan perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan serta peacebuilding.

17. Kemlu mewakili Indonesia terlibat dalam kampanye UN Women menginisiasi dua kampanye global terkait isu gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu "HeForShe" (dimana Presiden Joko Widodo menjadi salah satu Impact Champion) dan "Generation Equality". Kampanye HeForShe bertujuan untuk meningkatkan kontribusi kaum pria dalam mendorong kesetaraan gender, sementara Generation Equality menuntut persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam hal upah kerja, pembagian beban pekerjaan rumah tangga, penghapusan pelecehan seksual dan segala bentuk kekerasan (termasuk terhadap anak perempuan), layanan kesehatan sesuai kebutuhan, partisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan.

18. Kemlu mewakili Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain dengan menjadi negara pihak berbagai instrumen pokok HAM internasional, khususnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan implementasi Deklarasi Beijing dan Platform for Action tahun 1995 serta hasil-hasil Sesi khusus ke-23 SMU PBB tahun 2000.

19. Kemlu mewakili Indonesia juga menaruh perhatian besar pada agenda DK PBB "Women, Peace and Security" (resolusi DK PBB 1325), didasari komitmen untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan, meningkatkan perhatiannya terhadap pencegahan konflik, promosi budaya damai, toleransi dan pengakuan peran perempuan dalam keluarga untuk mencegah radikalisasi, memastikan nol toleransi pelecehan seksual dalam situasi konflik, dan meningkatkan kontribusi negara anggota untuk peacekeeping operations, khususnya mempromosikan dan meningkatkan peran perempuan dalam proses perdamaian dan misi PKO.

20. Kemlu mewakili Indonesia telah bergabung dalam Preventing Sexual Violence Initiative (PSVI), suatu koalisi global inisiatif dari Pemerintah Inggris untuk memerangi kekerasan seksual dalam konflik melalui upaya advokasi dan program aksi di tingkat nasional, regional dan global. Kemlu juga mewakili Indonesia berpartisipasi aktif pada Global Summit to End Sexual Violence in Conflict di London. Inggris telah kembali meluncurkan inisiatif penyusunan Murad Code, yang dimaksudkan akan menjadi global code of conduct dalam penanganan kekerasan seksual terkait konflik, yang aman, survivor-centric, beretika dan efektif.

21. Sejalan dengan isu perlindungan migran yang tengah memperoleh perhatian besar dari masyarakat Indonesia, maka Kemlu mewakili Indonesia bersama Filipina sejak 1993 menginisiasi dan memfasilitasi resolusi dua tahunan "Violence against Women Migrant Workers". Diadopsinya resolusi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengangkat kepentingan nasional Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja migran, dalam memperkuat upaya perlindungan pekerja migran khususnya pekerja migran perempuan.

22. Upaya Kemlu mewakili Indonesia di bidang kesetaraan gender juga diarahkan untuk mendukung upaya mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender di seluruh bidang pembangunan prioritas, pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.